MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 203 /DJMT/ST.KP7.1/VII/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 105/DJMT/KEP/OT1.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H./ 13004/P, Kolonel Laut (H), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganisminmil;
2. K.G Raegen, S.H., M.H./ 11070053480285, Mayor Chk, Hakim Yustisial;
3. Resa Januar Pratama, S.T./ 198501012011011016, Penata (III/c), Kasubbag Umum Kepegawaian Sekretariat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 24 sd. 26 Juli 2024;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2024

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Yuwono Agung Nugroho
Marsekal Muda TNI